

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN
HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)**

SKRIPSI



**Nama : Dewi Sari
Nim : 222016186**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

Penelitian

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN
HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Dewi Sari
Nim : 222016186**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Sari
NIM : 222016186
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dittulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 10 Februari 2020



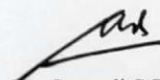
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil
Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
Nama : Dewi Sari
Nim : 222016186
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

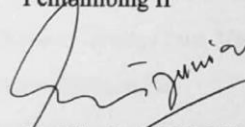
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Januari 2020

Pembimbing I



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021

Pembimbing II




Lis Diuniar, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Betti Sirajuddin, SE, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum berhasil. Yakinkanlah usaha akan sampai, karena sukses itu harus melewati banyak proses.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua Yang Selalu Mendo'akanku.*
- ❖ Saudari-saudari yang selalu mensupportku.*
- ❖ Pembimbing ku.*
- ❖ Almamaterku.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku bapak Matlian dan IbuFatma Wati yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si selaku pembimbing skripsi. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si selaku pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 10 Februari 2020

Penulis

Dewi Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Keagenan	13
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
4. Karakteristik Pemerintah Daerah	22
5. Hasil Pemeriksaan Audit BPK.....	29
6. Keterkaitan Antar Variabel	34
B. Penelitian Sebelumnya	38
1. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Operasionalisasi Variabel.....	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Data yang Diperlukan	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	62
a. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan	62
b. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan.....	63
c. Demografis Provinsi Sumatera Selatan	64
2. Gambaran Umum Provinsi Lampung	65
a. Sejarah Singkat Provinsi Lampung.....	65
b. Visi dan Misi Provinsi Lampung	65
c. Demografis Provinsi Lampung	66
B. Pembahasan.....	81
1. Uji Simultan	81
2. Uji Parsial.....	82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas	16
Tabel II.2 Penelitian Sebelumnya	38
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	44
Tabel III.2 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel dan Lampung	45
Tabel III.3 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel dan Lampung yang lengkap	46
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.....	64
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Lampung	66
Tabel IV.3 Hasil Statistik Deskriptif	67
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel IV.5 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel IV.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	72
Tabel IV.7 Hasil Uji Simultan	75
Tabel IV.8 Hasil Uji Parsial	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	69
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Yang Diperlukan
- Lampiran 2 Surat Selesai Riset
- Lampiran 3 Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 6 Sertifikat Toefl
- Lampiran 7 Sertifikat Magang
- Lampiran 8 Sertifikat Pelatihan Pendamping BUMDES
- Lampiran 9 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 10 Plagiarism Checker
- Lampiran 11 Biodata Penulis

Abstrak

Dewi Sari/222016186/2020/Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa LKPD tahun 2015-2017. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, umur pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: karakteristik pemerintah daerah, audit BPK, dan kinerja keuangan

Abstrak

This study aimed at determining the influence of local government characteristics and the results of BPK audit examinations on the performance of local government in the regencies/cities of South Sumatera and Lampung Province. The type of this study was an associative research. The population in this study was 31 regencies/cities in the Provinces of South Sumatera and Lampung. The data used was secondary data in the form of LKPD in 2015-2017. The data collection method used in this study was documentation. The data analysis technique used was quantitative and qualitative. Data analysis technique used was multiple linear regression. The results showed that, the age of local government and the level of dependence on the central governments affected the financial performance of local governments, while prosperity, capital expenditure, and the results of BPK audit examinations did not affect the financial performance of local governments.

Keywords: *characteristics of local government, BPK audit, and financial performance.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah harus melaksanakan semaksimal mungkin pelaksanaan dalam pemerintahannya agar dapat tercapai tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan terjamin akuntabilitasnya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara atau daerah, salah satunya adalah dengan menyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, setiap Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawab keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan seperti: laporan realisasi anggaran (LRA), laporan saldo

anggaran lebih (LSAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan soal, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. (Mahmudi, 2019: 13). Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. (Erlina, dkk, 2015: 19).

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukannya. (Erlina, dkk, 2015: 19). Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditunjukkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undang selama satu priode anggaran. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas

bisnis yang mencari laba. Laba bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah, oleh karena itu di perlukan alat ukur kinerja. (Mardiasmo, 2018: 208).

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik menilai pencapaian sesuatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran non finansial merupakan sebuah pendekatan yang menentukan tujuan serta berhubungan dengan visi dan strategi organisasi, sedangkan pengukuran finansial merupakan pengukuran yang mendorong organisasi pada pencapaian dan pertahanan keuntungan finansial jangka pendek. (Mardiasmo, 2018: 151). Pengukuran kinerja juga membantu masyarakat untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut. (Ihyaui, 2012: 20). Salah satu rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain adalah rasio efektivitas.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2018: 31). Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam tujuan sebuah kegiatan/kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, dan kegiatan. (Dedi Nordiawan, 2010:161). Secara umum, nilai efektivitas

dapat dikategorikan yaitu: > 100% sangat efektif, 100% efektif, 90%-99% cukup efektif, 75%-89% kurang efektif, dan < 75% tidak efektif. (Mahmudi,2019: 141).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menilai tingkat efektif dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: pertama untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan, dan ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, sehingga diperlukannya pemeriksaan atas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (Cris Kuntadi, 2019: 49). Pemeriksaan atas kinerja laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemeriksaan yang menilai aspek ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menilai apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu keharusan karna masih adanya fakta masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah adalah karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah

merupakan identitas dan ciri-ciri khusus yang dimiliki setiap daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Karakteristik pemerintah daerah berhubungan dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh setiap pemerintah daerah. Setiap organisasi mempunyai karakteristik yang menjadi ciri khas untuk menguatkan keberadaan organisasi tersebut seperti: umur daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kemakmuran, dan belanja modal. (Dedi, 2010: 68).

Umur daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan pemerintah daerah tersebut. (M. Ghufro, 2016). Pemerintah daerah yang memiliki umur daerah lebih lama memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP dibandingkan dengan pemerintah otonomi baru, karena memiliki kredibilitas, reputasi dan kinerja yang baik serta dapat meminimalisir faktor keterlambatan pelaporan.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat adalah pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan pada pemerintah pusat salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah berkaitan dengan pendapatan, belanja, aset lancar, dan kewajiban jangka pendek. (Abdul dan Syam, 2012: 40). Sementara belanja modal, belanja pembayaran hutang, aset tetap dan kewajiban jangka panjang di catat dalam dana pemerintah lainnya atau kelompok akun lainnya. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan cenderung membuat pemerintah daerah lebih menaati peraturan yang berlaku, karena dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang semakin besar membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan

penatausahaan keuangan. Sehingga LKPD tersaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini diserahkan kepada pemda sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan dari masing-masing daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Kemakmuran merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat diukur dari pendapatan perkapita daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pemerintah daerah dengan kekayaannya yang besar mampu melakukan pelayanan publik yang optimal. Jumlah kekayaan yang optimal mencerminkan pemerintah daerah mampu mengenali potensi-potensi kekayaan daerah. Kekayaan potensi-potensi daerah yang baik akan mendukung kinerja pemerintah daerah. (Pratiwi dan Aryani, 2019).

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode serta melebihi batasan minimal kapitalis aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap

tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. (Marja dan Horas, 2017: 128).

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap atau nilai aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. (Lis dan Ida: 2018).

Selain karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan juga diperlukan untuk menghindari berbagai macam tindakan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang harus dilaporkan segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menemukan opini yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tertentu ini ialah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. (Cris, 2019: 48).

Penelitian yang menguji tentang kinerja keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan, diantaranya seperti yang dilakukan oleh (Gusti Made Ary, 2018) dengan judul pengaruh karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa temuan audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja

keuangan daerah. Sementara faktor lain yaitu faktor ukuran pemerintah tidak terbukti menjadi faktor yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Terkait karakteristik kepala daerah hanya faktor variabel masa kerja yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Annas, 2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh signifikan positif. Serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Putu dan Ni Made Adi: 2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan kabupaten/kota Bali. Menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan pada kinerja laporan keuangan pemerintah. Temuan audit BPK yang ditunjukkan dengan temuan kasus pelanggaran atau kelemahan SPI tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Bali. Temuan audit BPK atas kasus kelemahan SPI tidak serta merta menjurus pada kerugian.

Hasil penelitian sebelumnya pun terdapat ketidak konsistensian terhadap kemakmuran, seperti yang dilakukan oleh (Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisyani, 2016) menyimpulkan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh (Samuel, dkk, 2016) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya dilihat dari belanja modal juga terdapat ketidak konsistensian hasil penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisyani, 2016) menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian (Saumel,dkk, 2016) meyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung tahun 2015-2017 masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang penyajian laporan keuangannya kurang efektif bahkan tidak efektif walau umur daerah tersebut sudah tergolong lama seperti: Kabupaten/kota Lahat pada tahun 2017 tidak efektif, Muara Enim pada tahun 2017 kurang efektif, Musi Banyuasin pada tahun 2016 tidak efektif, Ogan Komereng Ilir pada tahun 2015 dan 2017 tidak efektif, Lampung Selatan pada tahun 2016 tidak efektif, Bandar Lampung mulai tahun 2015-2017 tidak efektif. Berbanding dengan Kabupaten yang umur pemerintah daerahnya tergolong belum lama seperti Ogan Komereng Ulu Timur kinerja keuangannya sudah sangat efektif, bahkan kabupaten Way Kanan sudah cukup efektif. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki umur daerah lebih lama maka akan memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam penyajian laporan keuangan, sehingga kinerja keuangannya lebih efektif. Kemudian dari hasil pemeriksaan audit BPK jika dihubungkan dengan umur pemerintah kabupaten/kota masih terdapat Kabupaten/Kota yang masa umur pemerintah yang lama, namun kelemahan SPI masih banyak ditemukan sehingga meyebabkan rasio efektivitas kabupaten/kota kurang efektif bahkan tidak efektif.

Secara umum, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan semaksimal mungkin dalam melaksanakan pemerintahannya sehingga tercapai tata kelola pemerintah yang baik. BPK selalu mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang didalamnya memuat opini dan temuan terkait pemeriksaan. Opini dan temuan yang dikeluarkan terkait dengan laporan keuangan suatu daerah harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah tersebut. Hasil pemeriksaan dan temuan audit BPK kepada masing-masing kabupaten/kota, diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah kearah yang positif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan terjadinya ketidak konsistenan dari berbagai hasil penelitian terdahulu, maka mendorong penulis untuk melakukan pengujian kembali penelitian yang dituangkan dalam judul **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini alalah bagaimanakah pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatra Selatan dan Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bukti yang empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan pada sektor publik, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul dan Muhammad Syam.2012.*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Pemerintah Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Aditya dan Fikri. 2011. *Kamus Lengkap Bahas Indonesia*. Jakarta: As Agency.
- Annas L.Mappiasse. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan .*Dosen Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar*2(1)9Oktober, Dari File: Kartu SD/Samsung/Download/721141105 PB Pdf.
- Arfan Ikhsan Lubis. 2017. *Akuntansi Keperluan* . Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses 8 Januari 2020, Dari [https://Lampung.BPJS.go.id/dynamictabel/2018/04/11/391/jumlah penduduk-menurut-Kabupaten-Kota-di Provinsi-Lampung](https://Lampung.BPJS.go.id/dynamictabel/2018/04/11/391/jumlah_penduduk-menurut-Kabupaten-Kota-di_Provinsi-Lampung).
- Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses 8 Januari 2020, Dari [https://SumateraSelatan.BPJS.go.id/dynamictabel/2018/04/11/391/jumlahpendudukmenurut-Kabupaten-Kota-di Provinsi-SumateraSelatan](https://SumateraSelatan.BPJS.go.id/dynamictabel/2018/04/11/391/jumlahpendudukmenurut-Kabupaten-Kota-di_Provinsi-SumateraSelatan).
- Cris Kuntadi. 2014. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta : Saemba Empat.
- Darlis.(2017).*LaporanKeuangan Pemerintah Daerah*. From: [Http://Www.Djpk.Kemenku.Go.Id](http://Www.Djpk.Kemenku.Go.Id).
- Dedi Ismatullah. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Salemba Empat.
- Dekeng Setyo Budiarto Dan Luki Indarti.2019.Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Jurnal Akuntansi Bisnis*. 12 (1). Diakses 5 Februari 2020. Dari File:Kartu SD/Samsung/Downndload/12-6678-7PB.Pdf.
- Erlina, Omar Sakti Rambe,Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*l. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Galuh Anggraeny.2019.Pengaruh Jumlah Penduduk,Umur Pemerintah Daerah,Kekayaan Daerah Dan Ketersediaan Prasarana Trasport Terhadap Internet Financial Reporting. *Jurnal Ekonomi* 12 (2). Diakses 5 Februari 2020. Dari File: Karu SD/Samsung/Downndload/11-6563-2.PB.Pdf.
- Gamayuni Rika Rindu.2016. The Effect Of Local Government Characteistics And The Examination Result Of Indonesia Suprame Audit Institution Oneconomic Growth, With Financial Performance As Intervening Variabel In District And City Government Of Lampung Province. *Research Journal Of Financial And Accounting* 7 (18).Diakses 5 Februari 2020. Dari File:Kartu SD/Samsung/Downndload/12-6678-5PB.Pdf.

- I Gusti Made Ary Anggara Tama. 2018. Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi* 1 (1). Diakses 11 Oktober 2019. Dari File: Karu SD/Samsung/Download/11-6563-2.PB.Pdf.
- Ihyaul Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksa.
- Indra Bastian. 2014. *Audit Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Diakses 14 November 2019. dari <https://Kemendagri.go.id/wp-konten/upload/2019/05/kemendagri-EKPPD-Thdp-LKPD-2017>.
- Lestari Kustari, Rahayu Sri, dan Yudi. 2019. Effect of size of local, Government, Of wealth regional level of reliance capital expenditures and audit findings on BPK. *journal accounting*. 1 (2). Diakses 05 Februari 2020. Dari File: Karu SD/Samsung/Download/11-6563-2.PB.Pdf.
- Lis Djuniardan Ida Zuraidah. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis UM Palembang* 3 (2). Diakses 7 Oktober 2019 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 53-57-11-760.PB.Pdf.
- Muchamad Ghufon Taufik. 2015. Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah Karakteristik Inspektorat Pemerintah Daerah Dan Ketepatan Waktu Penyampaian L. *jurnal akuntansi dan bisnis*. diakses 9 Oktober 2019, dari file: Kartu SD/Samsung/Download/11-17-67.PB.pdf.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV ANDI (Anggota IKAPI).
- Marja Sinurat dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Muhardi. (2017, April). *Pembentukan Daerah*. Diakses 9 Oktober 2019 From: [Ttp://Www.Okda.Pemandagri.Go.Id](http://www.Okda.Pemandagri.Go.Id).
- Mutiara Madelia, Sri Rahayu, Yudi. pengaruh karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota kegislatif, dan opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. *jurnal ilmu akuntansi*. diakses 9 Oktober 2019, dari file: Kartu SD/Samsung/Download/14-17-57.PB.pdf.
- Nandhya Marfiani dan lulus kurniasih. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah. *Jurnal akuntansi dan bisnis Universitas Sebelas Maret*. diakses 27 Desember 2019, dari file: Kartu SD/Samsung/Download/11-457.PB.pdf

Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* 15 (2). Diakses 9 Oktober 2019, Dari File : Kart SD/Samsung/Download/1133-3876-1- PB.Pdf.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Noten Ardiyan, Febrianty Ayu, Sarikardawati, dan Ardiani Susi. 2019. Effect of administration on financial performance characteristics of local goverance municipal in south sumatera. *Journal Accounting*. 3 (2). Diakses 5 Februari 2020 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 24-905. PB.Pdf.

Oktavia. (2017, Februari). *Hasil Pemeriksaan BPK*. Diakses 9 Oktober. From: [Http://Www.Bpk.Go.Id](http://www.bpk.go.id).

Promono Hariadi dan Yanuar E Restianto. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Putu Reisty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi* 2016 14 (2). Diakses 9 Oktober 2019 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 542760.PB.Pdf.

Qowi Rizall dan Jatmiko Tri. 2017. Influence characteristics of local goverance and investigation the performance of government BPK district or city in indonesia fiscal year 2012. *Journal Accounting* 6 (1). Diakses 5 Februari 2020. Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 542760.PB.Pdf.

Ristu Pratiwi dan Y. Anni Aryani. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Kepala Daerah Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi* 20 (2). Diakses 9 Oktober 2019 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 34-905.

Samuel Cristan Ara. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Pulau Sumba. *Jurnal Akuntansi*. JAFFA 4 (1). Diakses 11 Oktober 2019, Dari File: Kartu SD/ Samsung/Download/53234.PB.Pdf.

Syaiful Bahri. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Republik Indonesia. (No.9 2015). *Tentang Peraturan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 . *Tentang Peraturan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2019. *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.*

Utama Rizki Fikri, Evana Einde, Gamayuni Rika Rindu. 2019. The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. *Research Journal Of Financial And Accounting* 12(2). Diakses 5 februari 2020 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 542760.PB.Pd